

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Komite Audit di Indonesia bisa dikatakan mengalami keterlambatan bila dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris dan Kanada (Siringoringo dan Simanjuntak, 2016). Hal ini karena ketentuan (regulasi) yang mengatur tentang Komite Audit oleh badan pengawas pasar modal (Bapepam), bursa efek jakarta (BEJ) dan kantor menteri badan usaha milik negara (BUMN) relatif masih baru. Keberadaan Komite Audit sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Pada saat ini adanya Komite Audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Grup penasihat peninjau adalah salah satu komponen vital dalam struktur administrasi perusahaan yang mengarahkan dan mengawasi dewan. Bapepam melalui Surat Edaran KEP-643/BL/2012 menetapkan organisasi publik untuk membentuk dewan pengawas.

Komite Audit merupakan salah satu bagian dari sistem administrasi perusahaan dalam menyelesaikan pengendalian ke dalam. Komite Audit mengambil bagian penting dalam mengelola tugas dan kerangka pengendalian internal organisasi yang sepenuhnya bertujuan untuk mengamankan kepentingan investor. Komite Audit menambah kemajuan pengaturan penting organisasi dan diandalkan untuk memberikan informasi dan usulan kepada staf manajerial puncak mengenai masalah keuangan atau fungsional. Dengan demikian, dianggap bahwa Komite Audit yang

kuat akan membidik dalam bekerja pada pameran dan intensitas organisasi, terutama dalam iklim bisnis yang berubah di luar kemampuan untuk mengendalikan organisasi, panel peninjau yang mahir diandalkan untuk nol dalam meningkatkan kelimpahan investor dan berusaha untuk tidak memperkuat kepentingan investor. individu oleh administrasi puncak (Rahardja, 2017).

Kinerja adalah upaya gerakan dalam menciptakan hasil yang paling ekstrim tergantung pada peningkatan kerja yang terkoordinasi, terkoordinasi dan terus-menerus untuk mencapai substansi eksekusi. Substansi pelaksanaan yang dimaksud adalah cakap, layak, kualitas dan jumlah. Inilah acuan makna asosiasi yang berbeda dalam mencirikan eksekusi secara komprehensif. Tentu saja pelaksanaan di dalam titik-titik cutoff yang berbeda memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya suatu tindakan kerja di koridor dewan dan organisasi yang sejalan dengan target pencapaian yang ideal, yang bergantung pada disiplin kerja (Agustini, 2016).

Estimasi pelaksanaan merupakan salah satu variabel utama bagi suatu asosiasi, khususnya untuk asosiasi area publik. Di era globalisasi saat ini, klinik medis sebagai salah satu asosiasi area publik harus secara konsisten menawarkan jenis bantuan yang ideal ke daerah setempat. Hal ini dikarenakan daerah tersebut semakin mencela pelayanan yang mereka dapatkan sehingga sudut pandang keuangan sampai saat ini bukanlah faktor utama yang dapat dijadikan sebagai semacam perspektif dalam survei pelaksanaan klinik kesehatan. Memperkirakan pameran asosiasi publik seperti klinik darurat tidaklah mudah jika dibandingkan dengan asosiasi nirlaba karena tujuan asosiasi publik bukan terletak pada bagaimana klinik

medis memberikan bantuan terbaik kepada daerah. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja di dalam klinik, diperlukan kerangka estimasi presentasi yang bertindak dari sudut pandang moneter serta mempertimbangkan perspektif non-moneter seperti klien, ukuran bisnis internal, serta pembelajaran dan pengembangan (Mursidin, 2017). Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, untuk menawarkan jenis bantuan kepada masyarakat umum, otoritas publik telah memberikan pengaturan yang ditujukan untuk mendorong organisasi yang didukung wajib pajak untuk membangun lingkungan bantuan yang luar biasa di setiap kantor administrasi.

Klinik kesehatan sebagai salah satu jenis perkumpulan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dimana salah satu upaya yang dilakukan adalah menjadi tujuan rujukan bagi pelayanan kesehatan tingkat bawah. Seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dokter spesialis praktek swasta dan berbagai klinik. Oleh karena itu, sebagai salah satu tujuan rujukan administrasi kesehatan, klinik gawat darurat perlu mengikuti sifat administrasi mereka kepada orang-orang yang kurang beruntung. Administrasi kesejahteraan ini terus-menerus diminta oleh klien administrasi di bidang kesehatan untuk terus meningkat dan pada akhirnya tujuan asosiasi dalam menawarkan jenis bantuan yang baik dan berkualitas dapat diselesaikan. Untuk memahami hal ini, tentu saja, tidak mudah karena harus ada peningkatan dalam bantuan para eksekutif dan tentu saja ada persaingan sengit antar klinik. Karena klinik gawat darurat menyaingi klinik darurat lain, tetapi juga bersaing dengan layanan kesehatan lainnya seperti klinik bersalin, klinik 24 jam, praktik

spesialis, praktik bantuan persalinan swasta, dan layanan kesehatan (Heri dan Misniari, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji topik tentang peranan komite audit terhadap kinerja manajemen menghasilkan temuan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Rani (2011) menguji “Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Dengan Menggunakan *Earning Restatement* Sebagai Proksi Dari Manajemen Laba”. Efek samping dari tinjauan ini menunjukkan bahwa otonomi dewan peninjau memiliki konsekuensi merugikan yang kritis pada pengurangan pendapatan, sementara kualitas yang berbeda dari kelompok penasihat peninjau tidak mendapatkan bukti dampak besar antara atribut-atribut ini dan pengurangan laba. Namun demikian temuan berbeda dihasilkan oleh Adiati dan Adiwibowo (2017) menguji “Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi komite audit independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan, keahlian keuangan komite audit dan keterpautan anggota komite audit pada komite nominasi remunerasi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan sedangkan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan, keterpautan anggota komite audit dan komite pemantau resiko berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan perbankan.

Informasi penting lainnya yaitu dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ternyata masih sangat terbatas yang mengkaji pada objek kinerja

manajemen rumah sakit umum daerah. Rumah sakit harus meningkatkan kinerja manajemennya guna mewujudkan pelayanan kesehatan dibidang jasa yang berkualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat dan menghasilkan kepuasan tersendiri dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Peranan Komite Audit Terhadap Kinerja Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana peran komite audit terhadap kinerja manajemen rumah sakit umum daerah (BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan komite audit terhadap kinerja manajemen rumah sakit umum daerah (BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa khususnya tentang peranan komite audit terhadap kinerja manajemen rumah sakit.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadikan bahan tinjauan untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pembahasan mengenai batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah pada pokok permasalahan yang dibahas peneliti, oleh karena itu diharapkan penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang ditetapkan. Peneliti membatasi penelitian ini pada:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.
2. Data penelitian ini berasal dari pegawai tetap Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*stockholder*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agent, teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti menjalankan bisnis sehari-hari (Tandiontong, 2016). Teori ini muncul setelah terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan, tujuan dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan adalah supaya pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin dengan dikelolanya perusahaan dengan tenaga-tenaga profesional (Tandiontong, 2016).

Para tenaga profesional bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki kekuasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba maka semakin besar pula manfaat yang diperoleh agen. Teori keagenan menyatakan perlunya jasa independen auditor dapat dijelaskan dengan dasar teori keagenan yaitu hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*) (Tandiontong, 2016).

Teori ini menjawab apa saja peluang terjadinya evaluator otonom yang kapasitasnya adalah untuk mengurangi biaya organisasi yang muncul dari perilaku keegoisan oleh atasan, bagaimanapun pertemuan yang berbeda, misalnya, para

eksekutif membutuhkan imbalan atau penghargaan ekstra untuk membangun kepuasan mereka. Perbedaan ini membuat keadaan yang tidak dapat didamaikan: (1) Antara investor dan dewan, (2) Antara investor dan pemegang utang (3) Antara direktur, investor dan pemegang utang (Soraya & Haridhi, 2017).

2.1.2 Pengertian Komite Audit

Komite Audit adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan (Swingly et al., 2015). Komite audit merupakan komite yang terdiri dari minimal tiga orang, diketuai oleh komisaris independen, dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (POJK no.55 2015). Komite audit adalah dewan yang terdiri dari setidaknya tiga orang yang bukan bagian dari eksekutif atau organisasi untuk menguji langsung dan mengevaluasi kewajaran laporan yang dibuat oleh organisasi. Hal ini dilakukan agar pihak administrasi tidak melakukan tindakan yang dapat membantu dirinya sendiri sehingga dapat merugikan pemilik organisasi (Sukirno et al., 2017).

Penelitian Nasution dan Setiawan (2007), Anugerah et al., (2011), Tiswiyanti et al., (2012) dan Raja et al., (2014) dalam (Sari, 2018) Dilacak bahwa kehadiran dewan peninjau dapat berdampak pada eksekutif untuk lebih berhati-hati dalam menyelesaikan kewajibannya karena dewan merasa bahwa pameran mereka diamati oleh kelompok penasihat peninjau. Oleh karena itu, wajar jika kehadiran panel

peninjau dalam suatu organisasi akan membangun pengawasan untuk membatasi peluang keuntungan dari kegiatan eksekutif.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kelompok Penasihat Peninjauan adalah kantor di bawah badan pejabat terkemuka yang bertanggung jawab untuk membantu melakukan pekerjaan tertentu sesuai target pembentukan dewan pengawas peninjau gratis baik dalam menyelesaikan kewajibannya maupun mengumumkan.

2.1.3 Sifat dan Pembentukan Komite Audit

Sifat dan perkembangan dewan peninjau dibingkai oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang berfungsi secara keseluruhan dan kapasitas untuk membantu pejabat dalam melakukan kewajibannya. Panel peninjau bebas baik dalam menyelesaikan kewajibannya maupun dalam merinci, dan secara langsung dapat diandalkan oleh hakim. Lebih jelasnya, (UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara) dan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menyatakan:

1. BUMN dan Emiten atau Perusahaan Publik perlu membentuk Komite Audit yang berperan serta dan memiliki kemampuan membantu Komisaris dan Dewan Pengawas.
2. Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang berhati-hati kepada Komisaris dan Dewan Pengawas.
3. Komite Audit terdiri dari paling sedikit satu Komisaris Independen dan sekitar dua orang lainnya dari luar asosiasi.

Dewan pengawas diarahkan untuk bertindak secara mandiri, kebebasan Komite Audit tidak dapat dipisahkan dari kualitas etika yang mendasari kejujurannya. Hal ini perlu disadari karena Komite Audit merupakan pihak yang merupakan perpanjangan tangan antara inspektur luar dan organisasi yang juga mencakup kapasitas administratif Dewan Komisaris dengan Auditor Internal.

2.1.4 Tujuan Pembentukan Komite Audit

Motivasi di balik Komite Audit sepenuhnya dalam arti Komite Audit itu sendiri. Forum Corporate Governance di Indonesia (FCGI, 2002) menyatakan bahwa Komite Audit memiliki target membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pengawasan secara umum.

Mengingat (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016) motivasi dibentuknya panel penelaah adalah untuk membantu dan melaksanakan kewajiban dan unsur Dewan Komisioner dalam menjamin kecukupan kerangka pengendalian interior dan pelaksanaan kewajiban evaluator luar dan inspektur dalam. Dewan peninjau bertindak bebas dalam menyelesaikan kewajiban dan kewajibannya. Individu panel peninjau diberi nama dan dimaafkan oleh kelompok pejabat terkemuka. Dewan peninjau terdiri dari sekitar 3 (tiga) orang dari pejabat otonom atau pihak yang berpotensi dari luar organisasi perlindungan. Kelompok penasihat peninjau harus dipimpin oleh seorang kepala otonom yang juga mengisi sebagai individu dari dewan peninjau.

Dari klarifikasi tersebut, cenderung terlihat adanya arti bahwa Komite Audit dibentuk karena tugas pengawasan dan tanggung jawab Dewan Komisaris organisasi

yang kurang memadai. Pemilihan individu dari Dewan Komisaris yang bergantung pada jabatan dan hubungan keluarga menyebabkan sistem check and equilibrium bagi Direksi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pekerjaan review batin belum berjalan secara ideal memikirkan hal itu secara fundamental, reviewer berada dalam situasi sulit untuk bersikap bebas dan objektif. Dengan demikian, ada minat untuk pengujian gratis, sehingga dewan peninjau muncul untuk memenuhi minat ini.

2.1.5 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Kewajiban dan kewajiban panel peninjau tidak boleh menyimpang dari kewajiban dan kewajiban pimpinan badan pimpinan. Kewajiban dewan pengawas yang bergantung pada (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016) adalah:

- a. Menyelidiki data moneter yang akan diberikan oleh organisasi perlindungan kepada masyarakat umum atau spesialis potensial.
- b. Memberikan saran kepada pimpinan badan pimpinan sehubungan dengan pengaturan pemegang buku tergantung pada kebebasan, tingkat tugas, dan biaya.
- c. Berikan survei tentang pengaturan dan pelaksanaan review oleh pemegang buku.
- d. Menyelidiki pelaksanaan pengendalian ke dalam dan membahayakan para eksekutif organisasi perlindungan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit bergantung pada:

- a. Gambaran umum tentang pelaksanaan kegiatan dan konsekuensi dari survei yang dipimpin oleh Unit Audit Internal dan Auditor Eksternal dengan tujuan agar eksekusi dan pengungkapan yang tidak standar dapat dicegah.
- b. Memberikan saran sehubungan dengan perbaikan kerangka pengendalian administrasi organisasi dan pelaksanaannya.
- c. Menjamin adanya sistem survei yang dapat diterima untuk data yang diberikan oleh BUMN, termasuk pamflet, laporan moneter sesekali, proyeksi/dugaan dan data moneter lainnya diserahkan kepada penyandang dana.
- d. Mengetahui hal-hal yang memerlukan pemikiran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- e. Melakukan berbagai tanggung jawab yang ditetapkan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang segala sesuatunya dipertimbangkan dalam batas-batas komitmen dan tanggung jawab Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang material.

Komite Audit bersama-sama memberikan evaluasi kepada kelompok pejabat terkemuka atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh staf manajerial puncak kepada kelompok pemimpin terkemuka, membedakan hal-hal yang memerlukan pertimbangan hakim, dan menyelesaikan berbagai tugas yang diidentifikasi dengan kewajiban kelompok pemimpin terkemuka.

Forum untuk Tata Kelola Perusahaan di Indonesia (FCGI, 2002) mengusulkan bahwa panel peninjau berkewajiban untuk memberikan pengawasan umum terhadap:

1. Pelaporan Moneter (*Financial Reporting*)

Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan otonom dan menjamin bahwa laporan keuangan yang disiapkan oleh eksekutif memberikan gambaran yang asli.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan independen bahwa proses pelaksanaan GCG telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite Audit bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan independen atas masalah atau hal-hal yang berpotensi mengandung resiko.

Kekuatan Komite Audit harus mencakup:

1. Mengarahkan pemeriksaan terhadap segala macam pergerakan dalam batas kewajibannya.
2. Carilah data penting dari setiap pekerja.
3. Carilah nasihat ahli hukum otonom dan lainnya jika mendasar.
4. Menyambut kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai, jika penting.

2.1.6 Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit biasanya terdiri dari beberapa individu. Dipimpin oleh hakim bebas. Seperti panel pada umumnya, meninjau kelompok penasihat dengan lebih sedikit individu pada umumnya akan lebih produktif. Namun, dewan peninjau dengan terlalu banyak orang juga memiliki kekurangan, khususnya tidak adanya berbagai pertemuan

bagian. Sejalan dengan ini, individu dari dewan peninjau memiliki pemahaman yang cukup tentang perencanaan ringkasan anggaran dan standar pengendalian ke dalam.

Kehadiran Komite Audit diarahkan melalui Surat Edaran Bapepam. SE-03/PM/2000 untuk asosiasi publik dan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 untuk BUMN Komite Audit terdiri dari sekitar tiga orang, dipimpin oleh seorang Komisaris Independen dari asosiasi dengan dua orang buangan bebas dan kontrol dan berpikir minimal dalam hal akuntansi dan kas.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Sarbanes-Oxley Act jumlah individu dari Komite Audit organisasi yang dirujuk (Rahmadani dan Haryanto, 2018) mensyaratkan bahwa: "Komite Audit akan terdiri dari lima orang, dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Mereka harus memiliki data penting tentang organisasi terkait uang. Dua dari lima orang telah menjadi pegawai negeri. Tiga lainnya bukan pegawai negeri. Ketua Komite Audit dijabat oleh seorang dari Komite Akuntan Publik, dengan pertimbangan bahwa selama lima tahun terakhir tidak bekerja sebagai pegawai terbuka. Eksekutif dan individu dari Komite Audit tidak diizinkan untuk mendapatkan bayaran dari perusahaan pembukuan publik kecuali tunjangan."

Koilam (2019) menyatakan bahwa anggota komite audit merupakan orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif dan lebih kompeten. Hal ini disebabkan karena anggota komite audit ini telah dibekali dengan pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan yang menunjang lingkup pekerjaannya sehingga akan lebih memahami pola manajemen laba di perusahaan dan dapat mencegahnya lebih awal.

Adapun indikator komite audit yaitu:

a. Independensi Komite Audit

Sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), arti otonomi menyiratkan bahwa pemegang buku publik tidak mudah terpengaruh. Pemegang buku publik tidak diizinkan untuk mendukung kecenderungan siapa pun. Pembukuan publik wajib berterus terang dengan para eksekutif dan pemilik teman serta dengan penyewa dan kelompok lain yang percaya pada pembukuan terbuka (SA Bagian 220, PSA No.4).

b. Keahlian Komite Peninjau

Dalam pasal 3 SPAP SA Pasal 210 disebutkan selain hal-hal lain bahwa dalam menyelesaikan pemeriksaan untuk muncul pada pernyataan penilaian, pemeriksa harus secara konsisten bertindak sebagai ahli di bidang pembukuan dan pemeriksaan. Pengadaan kemampuan ini dimulai dengan pelatihannya yang tepat, yang diperluas melalui pertemuan berikutnya dalam praktik peninjauan. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan sebagai seorang reviewer yang dapat melakukan fungsi review dengan baik, tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan formal saja tetapi juga harus ditunjang dengan wawasan yang membumi di lapangan dengan jam kerja yang memuaskan.

c. Tinjau Komitmen Waktu Komite

Untuk mencapai tujuan pengembangannya, individu kelompok penasihat peninjau harus tak kenal lelah dan siap untuk meluangkan waktu penting dalam memahami industri bisnis organisasi dan substansi pertukaran rumit organisasi.

Dewan peninjau tentu bukan individu yang sangat sibuk dengan berbagai latihan, sehingga mereka memiliki kesempatan yang cukup untuk membaca dengan teliti dan mensurvei kertas kerja dan laporan teman dan untuk bergabung dan mengadakan pertemuan kerja.

2.2 Kinerja

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

2.2.1 Pengertian Kinerja

Menurut Hasibuan (2016) kinerja dapat didefinisikan suatu hasil kerja yang telah dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta ketepatan waktu. Sedangkan (Mangkunegara, 2017) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara ilegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika (Afandi, 2018).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam instansi. Kinerja karyawan

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya instansi untuk mencapai tujuan.

2.3 Komite Audit Atas Kinerja

Tujuan utama organisasi adalah untuk memperluas nilai organisasi melalui perkembangan pemilik atau investor. Namun demikian, pengelola atau pengelola organisasi seringkali memiliki tujuan yang berbeda yang bertentangan dengan tujuan mendasar tersebut, sehingga menimbulkan situasi yang tidak dapat didamaikan antara pengelola dan investor.

Pertentangan ini dapat dibatasi oleh suatu perangkat administrasi yang dapat membandingkan kepentingan-kepentingan yang saling berhubungan, namun dengan berkembangnya suatu sistem administrasi akan menimbulkan biaya yang dikenal dengan biaya organisasi. Menurut (Rahmawati et al., 2017) menjelaskan bahwa Jensen dan Meckling pada tahun 1976 mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara agent (manajemen perusahaan) dan prinsipal (pemegang saham). Dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak antara prinsipal yang menyewa orang lain atau agen untuk melaksanakan jasa dan mengambil keputusan yang telah didelegasikan kepadanya. Sehingga dalam hubungan keagenan, manajemen diharapkan dalam mengambil kebijakan perusahaan terutama kebijakan keuangan yang menguntungkan pemilik perusahaan. Bila keputusan manajemen merugikan bagi pemilik perusahaan maka akan timbul masalah keagenan. Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan yang akan ditanggung baik oleh principal maupun agent.

Kinerja merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh setiap organisasi dimanapun, karena presentasi merupakan gambaran kemampuan organisasi dalam mengawasi dan mengalokasikan asetnya. Kerangka kerja estimasi presentasi yang layak adalah sekumpulan estimasi eksekusi yang melengkapi organisasi dengan data berharga yang mengawasi, mengontrol, dan melakukan latihan yang diatur yang diselesaikan oleh organisasi. Dengan estimasi presentasi, perusahaan diharapkan dapat bertahan dan tetap waspada terhadap persaingan dan kemajuan saat ini. (Iskandar, 2018).

Laporan keuangan merupakan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dalam proses penyusunan laporan keuangan akan sangat mempengaruhi dalam penilaian kinerja perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Berulangnya pertemuan dewan peninjau menunjukkan bahwa manajemen yang diselesaikan oleh dewan pengawas berjalan dengan sukses karena dalam setiap masalah yang terjadi dalam organisasi dapat langsung diperiksa dalam pertemuan kelompok penasihat peninjauan sehingga tujuan dapat ditemukan lebih cepat agar tidak mengurangi pameran organisasi.

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan

memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan komisaris (*board of directors*). Peran dewan direksi dengan pelaporan keuangan adalah ukuran dan independensi dewan direksi mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitoring proses pelaporan keuangan (Alexander, 2015). Hal ini sesuai dengan semangat *Good Corporate Governance* (GCG) yang dicanangkan oleh pemerintah terhadap perusahaan publik.

Adanya kepemilikan oleh institusi pendukung keuangan, misalnya organisasi proteksi, agen asuransi, bank, organisasi ventura. aset anuitas, dan tanggung jawab perusahaan akan memberdayakan pengawasan yang lebih ideal terhadap pelaksanaan dewan, karena kepemilikan saham merupakan sumber kekuatan yang dapat digunakan untuk membantu atau sebaliknya untuk kehadiran para eksekutif (Sintyawati dan Dewi S, 2018) .

2.4 Kegiatan Kinerja Manajemen Rumah Sakit

Tugas dewan pengawas dan administrasi puncak dalam mengerjakan kontrol interior dan eksekusi teman sangat besar. Selain itu, pelaksanaan pengawasan dapat bersifat memaksa jika ada tanggung jawab antara perkumpulan yang terlibat dengan perkumpulan, baik sebagai orang maupun perkumpulan. Ini direncanakan dengan

tujuan agar tujuan hierarkis dapat dicapai dengan tepat. Dengan tanggung jawab dan kontrol batin, sebuah asosiasi / organisasi yang mahir dan layak akan dibuat untuk membuat administrasi perusahaan yang hebat di dalam perusahaan, yang dengan demikian akan mendorong pelaksanaan hierarkis.

Menurut Afiandry (2016) menyatakan bahwa terdapat tiga kriteria keberhasilan RSUD yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam kegiatan kinerja manajemen, yaitu:

1. Siap untuk bertahan (endurance), khususnya kemampuan asosiasi untuk menemukan pilihan untuk memelopori jenis layanan kesehatan profesional.
2. Pengembangan, khususnya kemampuan asosiasi untuk mengembangkan usahanya agar dapat bertahan dalam persaingan dan lebih mengembangkan kualitas administrasi.
3. Produktivitas, khususnya kapasitas usaha asosiasi untuk membantu peningkatan bantuan pemerintah terhadap tenaga kerja.

2.5 Penelitian Sebelumnya

Banyak ujian terdahulu menjadi referensi dari penelitian ini. Dibawah ini ada beberapa penelitian yang terkait dan sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti sekarang, di antaranya yang tercantum dalam tabel 2.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
-----	--------------	------------------	---------------------	------------------

1.	Diantari dan Ulupui (2016)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Komite Audit (X_1), Proporsi Komisaris Independen (X_2), Proporsi Kepemilikan Institusional (X_3) dan <i>Tax Avoidance</i> (Y).	-Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . - Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . - Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Sukirno et al., (2017)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dan Persentase Saham Publik Terhadap Aktivitas Manajemen Laba.	Komite Audit (X_1), Kepemilikan Institusional (X_2), Persentase Saham Publik (X_3) dan Manajemen Laba (Y).	-Adanya komite audit mengurangi praktik manajemen laba. -Adanya Kepemilikan institusional mengurangi praktik manajemen laba. -Adanya persentase saham publik mengurangi praktik manajemen laba. -Adanya komite audit, kepemilikan institusional dan persentase saham publik, secara simultan berpengaruh mengurangi manajemen laba.
3.	Eksandy (2017)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap	Komisaris Independen (X_1), Komite Audit (X_2), Kualitas Audit (X_3) dan Penghindaran Pajak (Tax)	-Komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax)

		Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014).	<i>Avoidance</i>) (Y).	avoidance). -Komite audit tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). -Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).
4.	Kodriyah et al., (2017)	Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba.	Dewan Pengawas Syariah (X_1), Komite Audit (X_2), Dewan Komisaris (X_3) dan Manajemen Laba (Y).	-Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. -Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. -Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
5.	Darmawan dan Widhiyani (2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi Perusahaan Dan Komite Audit Pada <i>Audit Delay</i> .	Ukuran Perusahaan (X_1), Kompleksitas Operasi Perusahaan (X_2), Komite Audit (X_3) dan <i>Audit Delay</i> (Y).	-Ukuran perusahaan secara statistik berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap <i>audit delay</i> . -Kompleksitas operasi perusahaan secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>audit delay</i> . -Komite audit

				secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>audit delay</i> .
6.	Nugraheni dan Pratomo (2018)	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016).	Komite Audit (X_1), Kualitas Audit (X_2), Ukuran Perusahaan (X_3) dan <i>Tax Avoidance</i> (Y).	-Komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . -Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . -Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Masak dan Noviyanti (2019)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i> .	Komite Audit (X) dan <i>Financial Distress</i> (Y).	-Ukuran komite audit berpengaruh negatif pada <i>financial distress</i> . -Independensi komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> . -Frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> . -Jumlah ahli keuangan pada komite audit tidak berpengaruh terhadap kondisi <i>financial distress</i> .
8.	Mardiana dan Jantong (2020)	Peranan Komite Audit Dalam Hubungan	Peranan Komite Audit (X_1), Hubungan <i>Pressure</i>	- <i>External pressure</i> memiliki pengaruh negatif

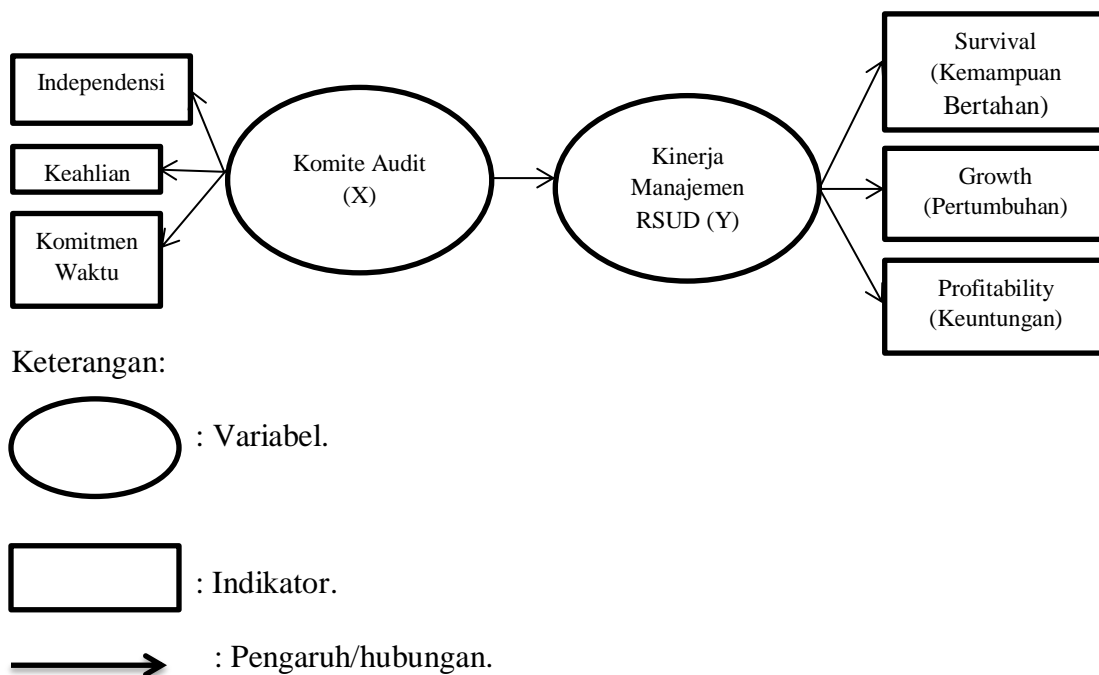
		<i>Pressure Dan Financial Statement Fraud.</i>	(X_2) dan <i>Financial Statement Fraud</i> (Y).	dan signifikan terhadap <i>financial statement fraud</i> . - <i>Financial target</i> memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap <i>financial statement fraud</i> . - Komite audit tidak mampu memoderasi hubungan <i>external pressure</i> terhadap <i>financial statement fraud</i> . - Komite audit tidak mampu memoderasi hubungan <i>financial target</i> terhadap <i>financial statement fraud</i> .
9.	Lestari dan Oktaviana (2020)	Peranan Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur).	Komite Audit (X_1), Dewan Pengawas Syariah(X_2), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y).	- Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. - Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
10.	Agatha et al., (2020)	Kepemilikan Manajerial, Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan <i>Food and Beverage</i> .	Kepemilikan Manajerial (X_1), Institusional(X_2), Dewan Komisaris Independen(X_3), Komite Audit (X_4) dan Kinerja Keuangan (Y).	- Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja

				keuangan perusahaan. -Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. -Komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
--	--	--	--	--

2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang ada diatas, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dalam merumuskan tentang peranan komite audit terhadap kinerja manajemen RSUD, adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.7 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori dari uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajemen RSUD Sawerigading Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Desain Penelitian

Eksplorasi ini adalah semacam pemeriksaan pencerahan kuantitatif, dengan memberikan garis besar di masa sekarang dan nanti. Eksplorasi kuantitatif menggambarkan efek samping, kejadian, kejadian yang terjadi. Eksplorasi ini berpusat pada keajaiban yang terjadi pada saat pemeriksaan diarahkan. Teknik pemeriksaan kuantitatif dapat diartikan sebagai strategi eksplorasi yang bergantung pada cara berpikir positivisme, digunakan untuk memeriksa populasi atau tes tertentu, berbagai informasi menggunakan instrumen penelitian, penyelidikan informasi terukur yang sepenuhnya bertujuan untuk menguji teori yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2018).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo. Alamat Jl. Dr. Ratulangi Km. 7 Rampoang Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga bulan terhitung dari bulan Juni sampai pada bulan Agustus 2021.

3.3 Populasi dan Sampel

salah satu bagian dalam desain penelitian adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Penentuan populasi dan sampel penelitian menjadi sangat penting. Karena hasil penelitian akan mengambil kesimpulan secara luas (generalisasi hasil

penelitian). Ketepatan dan keakuratan dalam penentuan populasi dan sampel penelitian akan memberikan bobot dengan kualitas hasil penelitian.

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai tetap Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo yang berjumlah 100 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi (Sugiyono, 2018). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Convenience Sampling* yaitu metode pengujian dengan mengedarkan berbagai polling dan memanfaatkan survei yang kembali dan dapat disiapkan. Contoh dalam ulasan ini adalah pegawai tetap Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo yang mengembalikan kuesioner. Adapun jumlah responden yang mengembalikan kuesioner berjumlah 62 orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian informasi yang digunakan merupakan informasi yang bersifat kuantitatif sebab dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya.

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari angket yang dibagikan kepada responden. kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis. Pilihan jawaban juga telah tersedia, responden memilah jawaban yang sesuai dan dianggap benar setiap individu. Data primer dalam penelitian ini dari angket atau kuesioner yang dibagikan kepada responden (Sugiyono, 2018).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yaitu metode pengumpulan informasi dengan memberikan ikhtisar pertanyaan kepada responden yang memiliki kapasitas untuk mengungkap data. Untuk situasi ini, survei adalah metode yang memberikan informasi paling banyak.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel yang diteliti dengan menemukannya secara singkat dan jelas. Berikut adalah definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian.

3.6.1 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas atau Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Komite Audit (X).

2. Variabel Terikat atau Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau dependen adalah Kinerja Manajemen RSUD (Y).

3.6.2 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Komite Audit (X)

Komite audit merupakan satuan yang membantu dewan komisaris independen dari perusahaan, maka selain kompetensi prasyarat lain yang perlu dimiliki adalah independensi. Independensi diperlukan agar komite audit tidak dapat diganggu

gugat oleh manajemen dan tidak mengurangi kemandiriannya dalam menyatakan sikap dan pendapat.

2. Kinerja Manajemen (Y)

Kinerja manajemen merupakan kegiatan strategis yang diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil dan dihubungkan dengan visi yang diemban.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti yang berisi beberapa item pertanyaan tentang persepsi terhadap masalah penelitian. Instrument dalam penelitian ini menggunakan *Skala Likert* yang disajikan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Sangat Setuju | diberi nilai 5 |
| 2. Setuju | diberi nilai 4 |
| 3. Netral | diberi nilai 3 |
| 4. Tidak Setuju | diberi nilai 2 |
| 5. Sangat Tidak Setuju | diberi nilai 1 |

3.8 Analisis Data

Teknik Analisis data adalah berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel (Sugiyono, 2018).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.8.1 Uji Kualitas Data

Sifat informasi pemeriksaan pada teori sangat bergantung pada sifat informasi yang digunakan dalam tinjauan. Kualitas dan pemeriksaan dikendalikan oleh instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan informasi untuk menyampaikan informasi material. Tes yang digunakan untuk menguji sifat informasi dalam tinjauan ini adalah tes kualitas legitimasi dan tak tergoyahkan.

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung hubungan antara skor hal dari setiap pertanyaan dan skor pertanyaan. Estimasi diselesaikan dengan menggunakan program SPSS (Paket Statistik untuk Ilmu Sosial). Pengujian legitimasi memiliki aturan jika bernilai sig. (2-diikuti) pada skor build absolut $< 0,05$ atau sebaliknya jika r hitung lebih besar dari r tabel (pada tingkat kepentingan 0,05), maka pada titik itu, pernyataan atau penanda seharusnya menjadi "sah" dan juga sebaliknya.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah instrumen yang dimaksudkan untuk mengukur survei yang merupakan penanda suatu variabel atau bangunan. Sebuah survei seharusnya solid atau dapat diandalkan jika respons individu terhadap suatu pernyataan stabil atau

stabil setiap saat (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan. Dalam pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,6 dimana jika nilai nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,6 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,6 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel.

3.8.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi Linier Sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas/*predictor* (X) dengan satu variabel tak bebas/*response* (Y).

Adapun model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX + e$$

Dimana:

Y = Kinerja Manajemen RSUD

α = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Komite Audit

e = *Standart error*

3.8.3 Uji Hipotesis

Uji statistik digunakan untuk melihat ketepatan atau keakuratan dari suatu fungsi atau persamaan untuk menaksir dari data yang kita analisis. Nilai ketepatan ini dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Dapat dilihat dari nilai t hitung, F hitung dan nilai determinasinya. melalui pemeriksaan kekambuhan, kemudian, pada saat itu, mencoba realitas teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya dan kemudian menguraikan hasilnya. Kemudian, dinamika spekulasi tersebut dapat dilihat dari nilai produktivitas kritis dari setiap faktor yang terdapat pada hasil pemeriksaan kekambuhan dengan menggunakan SPSS dengan asumsi angka yang besar $< (0,05)$ dikatakan terdapat pengaruh yang besar antara faktor bebas pada variabel terikat.

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien kepastian (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam mengklarifikasi varietas pada variabel terikat (terikat). Nilai koefisien jaminan berada di suatu tempat di kisaran nol dan 1. Nilai kecil R^2 menyiratkan bahwa kapasitas faktor-faktor yang bergantung sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu menyiratkan bahwa faktor bebas memberikan hampir semua data yang diharapkan untuk meramalkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2018).

2. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan tingkat signifikansi 5% maka kriteria pengujian dalam penelitian ini adalah (Ghozali, 2018).

- a. Apabila $t_{sig} < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Apabila $t_{sig} > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.9 Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS type 23 yang menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk jenis penelitian kuantitatif. SPSS itu sendiri merupakan program komputer yang banyak digunakan untuk mengolah data statistik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo sudah menjadi Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Luwu yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda pada tahun 1920 yang merupakan salah satu bangunan yang dikenang pada titik fokus pemerintahan Kerajaan Luwu. Banyak potongan struktur yang tidak masuk akal untuk digunakan sebagai klinik, sehingga sulit untuk menjaga kredibilitasnya sebagai peninggalan yang tercatat.

Klinik tersebut belakangan ini berstatus klinik kesehatan tipe D, dan pada tahun 1994 dipindahkan ke klinik tipe C, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 396/Menkes/KS/IV/1994 (sebagai jabatan). Kemudian pada saat itu, sekitar saat itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor: 9 Tahun 2002 Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo yang tadinya kantor berubah menjadi kantor administrasi.

Pada saat kota administratif sebagai ibu kota Kabupaten Luwu mengalami perubahan status menjadi kota otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, RSUD Sawerigading Kota Palopo juga mengubah induknya dari Pemerintah Kabupaten Luwu menjadi Pemerintah Kabupaten Luwu. Pemerintah Kota Palopo. Terjadi penyesuaian nama dari Badan Pengelola Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit, dengan tujuan agar Pemerintah Kota Palopo yang terdekat kembali

mengitari asosiasi dan strategi kerja RSUD Sawerigading Kota Palopo. Dengan arahan otoritas publik dan daerah untuk lebih bekerja pada sifat administrasi secara memadai dan produktif, Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo saat ini diusulkan untuk menjadi klinik non-instruktif tipe B.

Sebagai unit bantuan masyarakat yang merupakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara lengkap sesuai pengumuman ketua palopo tanggal 9 April 2012 perihal berdirinya Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memanfaatkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status penuh Pemerintah Daerah Badan Layanan Umum (BLUD), meski pelaksanaannya baru dimulai pada 1 Januari lalu. , 2014 di bidang organisasi (pengurus) dituntut untuk mampu dengan pemikiran bisnis yang sehat dan tidak hanya untuk membantu .

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan BLUD RSUD Sawerigading Palopo

1. Visi

Menjadi pusat rujukan terpercaya di Sulawesi Selatan pada tahun 2023.

2. Misi

Misi BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo adalah memberikan yang wajar, masuk akal dan sesuai standar akreditasi klinik gawat darurat, melaksanakan administrasi klinik gawat darurat dan administrasi klinis yang hebat, mengatur pengajaran, pemeriksaan dan persiapan SDM untuk bekerja pada kapasitas untuk

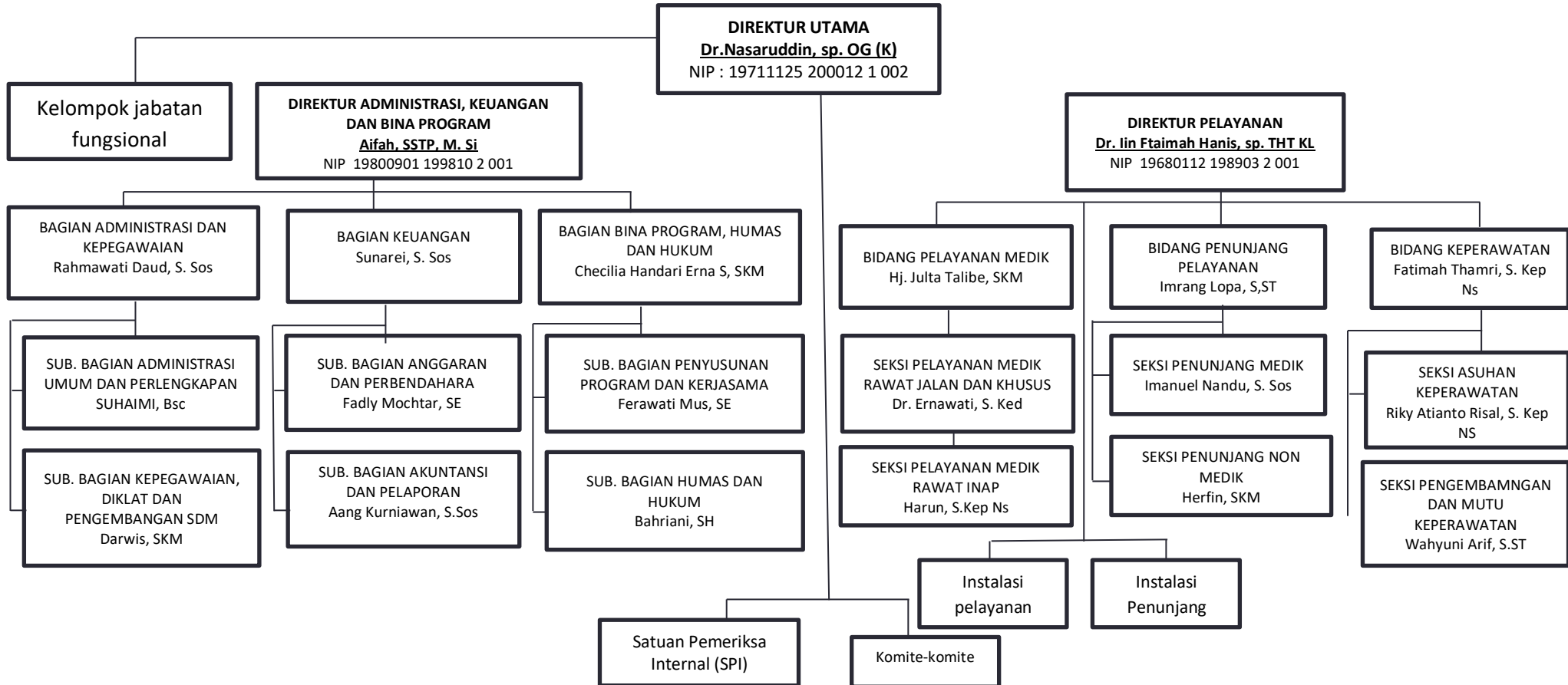
menawarkan jenis bantuan. administrasi kesejahteraan, dan bekerja pada kualitas dan jumlah aset klinik medis dengan cara yang dapat dipertahankan.

3. Tujuan

Tujuan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo ada dua yaitu tujuan luas dan target luar biasa. Sasaran keseluruhannya adalah untuk memberikan perawatan administrasi kesehatan, penyembuhan, antisipasi, peningkatan kesehatan klinik medis, administrasi rujukan, pelatihan, pemeriksaan dan administrasi wilayah. Untuk sementara sasaran khusus BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo adalah lebih mengembangkan status kesejahteraan yang ideal bagi wilayah setempat, menjadikan BLUD RSUD Sawerigading Palopo sebagai tempat rujukan total, memajukan BLUD RSUD Sawerigading Palopo menjadi memiliki pilihan untuk menjadi administrator instruksi kesehatan ahli dan pelatihan kesehatan. terletak pada kepercayaan dan pemenuhan pasien.

4.1.3 Struktur Organisasi BLUD Rumah Sakit Sawerigading Palopo

**Gambar 4.1 Susunan Struktur Organisasi Tipe B
RSUD Sawerigading Palopo
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor : 5 Tahun 2015**



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskriptif Responden

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel yaitu pegawai tetap yang bekerja di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo. Dari 100 kuesioner yang dibagikan kepada Pegawai tetap yang Kerja di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo, terdapat 38 TPS yang tidak sempurna atau tidak kembali dengan alasan pada jam peninjauan tidak semua petugas ditetapkan. Agregat dari 62 perwakilan yang sangat tahan lama yang bekerja di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo berhasil di kumpulkan sebagai Responden dalam Penelitian ini. Klasifikasikan berdasarkan Pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah (jiwa)
1.	Kuesioner yang disebarakan	100
2.	Kuesioner yang direspon	62
3.	Kuesioner yang tidak direspon	38
4.	Tingkat pengembalian	$62/100 \times 100\% = 62\%$

Sumber: data primer diolah 2021

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa dari 100 kuesioner yang dibagikan terdapat 38 kuesioner yang tidak dikembalikan dan 62 kuesioner yang dikembalikan. Jika dipersentasekan pengembalian kuesioner adalah 62%.

4.2.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total dengan menggunakan *pearson correlation*. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikan dibawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Dapat diketahui hasil uji validitas dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk semua variabel dinyatakan valid, karena nilai signifikan lebih kecil 0,05 (5%) dan karena korelasi antara masing-masing skor pernyataan lebih besar dari r tabel yakni 0.2500. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

Variabel (x)	Pernyataan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Nilai sig.	Ket
Komite Audit	X1	0.610	0.2500	0.000	Valid
	X2	0.671	0.2500	0.000	Valid
	X3	0.642	0.2500	0.000	Valid
	X4	0.669	0.2500	0.000	Valid
	X5	0.619	0.2500	0.000	Valid
	X6	0.347	0.2500	0.006	Valid
	X7	0.359	0.2500	0.004	Valid
	Y1	0.419	0.2500	0.001	Valid

Kinerja Manajemen RSUD	Y2	0.608	0.2500	0.000	Valid
	Y3	0.501	0.2500	0.000	Valid
	Y4	0.446	0.2500	0.000	Valid
	Y5	0.439	0.2500	0.000	Valid
	Y6	0.420	0.2500	0.001	Valid
	Y7	0.359	0.2500	0.004	Valid

Sumber: data primer diolah 2021

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan tentang komite audit (X) dan kinerja manajemen RSUD (Y) dapat dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrument penelitian dikatakan reliable jika nilai *cronbach Alpha* berada diatas 0,6. Berikut hasil uji reliable, yaitu:

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Komite Audit	0,849	Reliabel
Kinerja Manajemen RSUD	0,821	Reliabel

Sumber: data primer diolah 2021

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* dari semua variabel $> 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument dari kuesioner

penelitian dapat dipercaya sebagai alat ukur dalam menjelaskan variabel komite audit (X) dan kinerja manajemen RSUD (Y).

4.2.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Pengujian melalui regresi linear sederhana dilakukan untuk menganalisis peranan komite audit terhadap kinerja manajemen RSUD. Maka untuk menguji hipotesis diatas diperlukan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS 23 dan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.657	3.894		4.021	.000
	Komite Audit (X)	.412	.128	.383	3.207	.002

Sumber: data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persamaan linear sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 15.657 + 412X$$

- Dari model regresi tersebut dapat diambil kesimpulan pada tabel tersebut angka konstanta diatas menunjukkan angka 15,657 ini berarti jika variabel komite audit bernilai nol maka nilai variabel kinerja manajemen RSUD 15,657.

- Sedangkan koefisien regresi dari komite audit adalah 0,412 yang menyatakan ada pengaruh positif terhadap kinerja manajemen RSUD. Hal ini berarti setiap penambahan variabel komite audit sebesar satu persen maka akan menambah variabel kinerja manajemen RSUD sebesar 0.412 atau 41,2%.

4.2.4 Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang mampu memperjelas variasi variabel terikat. Konsekuensi dari koefisien assurance test (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.383 ^a	.146	.132	4.111

Sumber: data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai R Square sebesar 0,146 artinya bahwa komite audit memiliki pengaruh sebesar 14,6% terhadap kinerja manajemen RSUD sedangkan 85,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen signifikan terhadap variabel dependen yang diformulasikan dalam model. Hasil uji statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.657	3.894		4.021	.000
	Komite Audit (X)	.412	.128	.383	3.207	.002

Sumber: data primer diolah 2021

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui nilai t hitung variabel komite audit (X) sebesar $3,207 > t$ tabel yaitu 1.67065, dengan nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ artinya komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajemen RSUD.

2.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial (uji t) yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Manajemen RSUD dengan nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ dan hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan nilai koefisien 0,412 atau 41,2% maka diperoleh hasil bahwa variabel Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Manajemen RSUD (BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo).

Menurut Kodriyah et al., (2017) komite audit atau *audit committee* (AC) merupakan suatu komite yang bertugas melakukan audit internal sebuah organisasi. Dalam lingkup Tata Kelola Perusahaan yang Baik, tanggung jawab kelompok penasihat peninjau adalah untuk memberikan penegasan bahwa organisasi secara bijaksana menyetujui undang-undang dan pedoman terkait, mengoordinasikan dan menangani bisnisnya secara moral, dan mengikuti otoritas yang kuat atas keadaan yang tidak dapat didamaikan di antara perwakilan dan perilaku yang tidak menguntungkan. .

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agatha et al., (2020) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Keberadaan komite audit akan memastikan bahwa perusahaan akan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi yang akurat dan berkualitas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil uji regresi linear sederhana tersebut dapat dikatakan nilai koefisien komite audit 0,412 berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajemen rumah sakit umum daerah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan komite audit maka variabel kinerja manajemen rumah sakit umum daerah naik sebesar 0,412. Sedangkan secara uji statistik t diketahui nilai t hitung variabel komite audit (X) sebesar $3,207 > t$ tabel yaitu 1.67065, dengan nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ artinya komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajemen rumah sakit umum daerah, sehingga hipotesis pertama diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, pencipta memberikan ide, antara lain:

1. Eksplorasi ini dipercaya dapat dimanfaatkan sebagai semacam hotspot perspektif untuk kajian tambahan yang memiliki kesamaan poin dan topik.
2. Selain memanfaatkan survei yang disusun, cenderung ditambah dengan memanfaatkan rapat atau rapat. Selain itu, analisis masa depan diandalkan untuk melakukan penelitian dengan cakupan responden yang lebih luas sehingga pengujian dapat digunakan secara menyeluruh. Juga, analisis lebih lanjut diandalkan untuk menambahkan faktor penelitian.

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi rumah sakit umum daerah agar bagaimana rumah sakit perlu menjaga kualitas layanannya terhadap masyarakat yang membutuhkan agar selalu bertambah lebih baik lagi.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiati, Yashita, and Agustinus Santosa Adiwibowo. 2017. "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 - 2015." *Diponegoro Journal of Accounting* 6(4):363–77.
- Afandi, P. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep Dan Indikator)*. Riau: Zanafafa Publishing.
- Afiandry. 2016. "Pengaruh Capital Expenditure Dan Capital Structure Terhadap Profitabilitas (Suatu Studi Pada Rumah Sakit Al Islam Bandung)."
- Agatha, Bella Riantiarta, Siti Nurlaela, and Yuli Chomsatu Samrotun. 2020. "Kepemilikan Manajerial, Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Food and Beverage." *E-Jurnal Akuntansi* 30(7):1811. doi: 10.24843/eja.2020.v30.i07.p15.
- Agustini. 2016. "Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Kelompok Tani Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa." 4(4).
- Alexander. 2015. "Pengaruh Mekanisme Goodcorporate Governance Terhadap Manajemen Laba." 1–9.
- Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003. 2003. "Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit."
- Darmawan, I. Putu Yoga, and Ni Luh Sari Widhiyani. 2017. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi Perusahaan Dan Komite Audit Pada Audit Delay." *E-Jurnal Akuntansi* 2017(1):254–82.
- Diantari, Putu Rista, and IGK Agung Ulupui. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 16(1):702–32.
- Eksandy, Arry. 2017. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)." *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1(1):1. doi: 10.31000/competitive.v1i1.96.
- Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2002. "Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II: Peranan Dewan Komisaris Dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Corporate Governance."
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hasibuan, Malayu S. .. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Heri, Helwen, and Misniari. 2019. “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Terhadap Kepuasan Dalam Membangun Loyalitas (Studi Pada Pasien Rawat Jalan Umum Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Kota Pekanbaru).” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan* (x):53–67.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan*. Revisi 200. Jakarta: Salemba Empat.
- Iskandar, Dhany. 2018. “Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dan Kepuasan Kerja Dan Dampaknya Terhadap Produktivitas Karyawan.” *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 12(1):23–31. doi: 10.32812/jibeka.v12i1.8.
- Kodriyah, Neneng Sri Suprihatin, and Santi Octaviani. 2017. “Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba.” *Jurnal Akuntansi* 4(2):59–64.
- Koilam, Deny Novazeus. 2019. “Pengaruh Ukuran Komite Audit, Keahlian Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Masa Jabatan Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indon.” *Universitas Diponegoro*.
- Lestari, Iin Fitri, and Ulfi Kartika Oktaviana. 2020. “Peranan Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada BPRS Di Jawa Timur).” *El Dinar* 8(1):29. doi: 10.18860/ed.v8i1.7611.
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiana, Ana, and Alfonsus Jantong. 2020. “Peranan Komite Audit Dalam Hubungan Pressure Dan Financial Statement Fraud.” *SEIKO: Journal of Management & ...* 3(3):14–30.
- Masak, Febri, and Suzy Noviyanti. 2019. “Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress.” *International Journal of Social Science and Business* 3(3):237. doi: 10.23887/ijssb.v3i3.21002.
- Mursidin, Nurhalisah. 2017. “Pengukuran Kinerja Sektor Publik Ditinjau Dari Perspektif Balanced Scorecard (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Barru).” 11(1):92–105.
- Nugraheni, Arfenta Satria, and Dudi Pratomo. 2018. “Pengaruh Komite Audit,

- Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.” 26(2):241–53.
- Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 29/POJK.04/2016. 2016. “Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.”
- POJK no.55. 2015. “Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaa Kerja Komite Audit.”
- Rahardja, Evelyn Effendy. 2017. “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Dan Independensi Dewan Komisaris Terhadap Frekuensi Rapat Komite Audit Di Indonesia.”
- Rahmadani, Suci, and Haryanto. 2018. “Manajemen Laba: Peran Keaktifan Komite Audit Dan Auditor Eksternal Big Four (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2013-2015).” *Jurnal Akuntansi Aktual* 5(1):46–62.
- Rahmawati, Inge, Brady Rikumahu, and Vaya Juliana Dillak. 2017. “Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*.
- Rani, Prawita Mandhega. 2011. “Pengaruh Kinerja Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Dengan Menggunakan Earning Restatement Sebagai Proksi Dari Manajemen Laba).” 1–69.
- Sari, Anna. 2018. “Pengaruh Komite Audit, Internal Auidt, Risk Management Commitee Terhadap Manajemen Laba.”
- Sintyawati, Ni Luh Ary, and Made Rusmala Dewi S. 2018. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Biaya Keagenan Pada Perusahaan Manufaktur.” 7(2):993–1020.
- Siringoringo, Magdalena Judika, and Oloan Simanjuntak. 2016. “Peranan Komite Audit Dalam Meningkatkan Kinerja (Retorika Pada Perusahaan BUMN).” (1645):1–76.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dab R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Afrida Putritama, Patriani Wahyu Dewanti, and Adeng Pustikaningsih. 2017. “Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dan Persentase Saham Publik Terhadap Aktivitas Manajemen Laba.” 11(1):92–105.
- Surat Edaran Bapepam. No.SE-03/PM/2000. 2000. “Tentang Komite Audit.”

Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002. 2002. “Tentang Kesehatan BUMN.”

Swingly, Calvin, and Sukartha I Made. 2015. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance.”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.